

**IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA MELALUI KEGIATAN BERBASIS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DESA TAMBONG WETAN,  
KECAMATAN KALIKOTES, KABUPATEN KLATEN)**

*FUND PROGRAM IMPLEMENTATION VILLAGE ACTIVITY THROUGH THE BASE OF  
COMMUNITY DEVELOPMENT (CASE STUDY OF TAMBONG WETAN VILLAGE,  
KALIKOTES DISTRICT, KLATEN REGENCY)*

Oleh : Ivan Zulfikar Wibowo, Dra. Puji Lestari M.Hum

Email : [ivanzwibowo45@gmail.com](mailto:ivanzwibowo45@gmail.com)

**ABSTRAK**

Desa Tambong Wetan merupakan desa yang mendapatkan alokasi anggaran dari Program Dana Desa dari pemerintah pusat. Program Dana Desa merupakan bantuan alokasi keuangan yang langsung diberikan ke rekening pemerintahan desa dan dikelola oleh desa itu sendiri, agar menjadi desa yang mandiri, serta memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Dana Desa di Tambong Wetan, serta mengetahui dampak sosial ekonomi adanya program ini terutama dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Validitas data menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan antara satu data dengan data lain untuk pengecekan. Sedangkan, pada teknik analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan program Dana Desa di desa Tambong Wetan diimplementasikan dalam bentuk pembangunan fisik maupun non-fisik (pemberdayaan masyarakat). Pembangunan fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana dasar seperti jalan, saluran irigasi pertanian, pembangunan gedung PAUD, Pembangunan Poliklinik Kesehatan Desa. Sementara dalam bentuk non fisik berupa pelatihan keterampilan, pelatihan kewirausahaan, pembinaan Karang Taruna dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga. Program Dana Desa di desa Tambong Wetan ini berbasis pada pemberdayaan masyarakat, setiap warga desa Tambong Wetan terlibat dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan menggunakan anggaran Dana Desa. Dampak Sosial Ekonomi Program Dana Desa terlihat dengan peningkatan kesejahteraan warga desa, tumbuhnya perekonomian desa, terkelolanya potensi sumber daya lokal desa, terjangkanya masyarakat desa dalam pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi serta yang terpenting adalah tumbuhnya rasa kebersamaan, keswadayaan, gotong-royong, dan partisipasi masyarakat.

**Kata kunci : dana desa, pemberdayaan masyarakat desa, desa Tambong Wetan.**

## **ABSTRACT**

*Tambong Wetan is a village that receives a budget allocation the village fund program from the central government. The village fund program is a financial allocation assistance that is directly given to village government accounts and managed by the village itself, so that it becomes and independent villages, and provides welfare for the village community. The purpose of this study was to determine the implementation of the village fund program in Tambong Wetan, and to determine the socioeconomic impact of the existence of this program, especially in the form of community empowerment. This research is a descriptive qualitative research that uses primary and secondary data sources. Data collection techniques used were observation, interviews, literature study, and documentation. The selection of informants uses purposive sampling and snowball sampling techniques. Data validity uses sources triangulation techniques by comparing one data with another data for checking. Meanwhile, the data analysis technique uses the model of Miles and Hubberman, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. The results of the study showed that the village fund program at Tambong Wetan village was implemented in the form of physical and non-physical construction (community empowerment). Physical development in the form of construction of basic facilities and infrastructure such as roads, agricultural irrigation channels, construction of PAUD buildings. Development of village health polyclinic. While in the non physical form of skills training, entrepreneurship training, and family welfare development. The village fund program is based on community empowerment, every villager is involved and actively participates in carried out using the village fund budget. The socio-economic impact of the village fund program can be seen from the increase in the welfare of the villagers, the growth economy, the management of the village local potential resources, the outreach of the village community in basic services and sosio-economic activities, and most importantly the growing sense of togetherness, self-reliance, mutual cooperation, and participation public.*

**Keywords:** *village funds, community empowerment, Tambong Wetan village.*

## **A. PENDAHULUAN**

Agenda otonomi daerah telah menjadikan negara Indonesia memiliki berbagai skema dan cara dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Bangsa Indonesia yang memiliki banyak permasalahan dan situasi terutama tentang tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial maka dengan adanya otonomi daerah diharapkan dapat menjadi pilihan rasional yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan besar yaitu kesenjangan sosial yang semakin tinggi. Otonomi daerah dianggap sebagai opsi tepat untuk meningkatkan derajat keadilan sosial serta distribusi kewenangan secara proporsional antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah dalam hal penentuan kebijakan publik, penguasaan aset politik, serta sumber daya lokal yang ada. Ditetapkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Dana Desa menegaskan bahwa pemerintahan desa diberi kewenangan untuk mengelola anggaran desa yang diberikan dari pemerintah pusat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan di tingkat paling bawah dalam tingkatan pemerintahan di Indonesia. Pengertian desa menurut Suharto (2009) adalah suatu kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.

Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Adisasmita Raharjo dalam bukunya *Pembangunan Perdesaan* menjelaskan bahwa kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa untuk meningkatkan pelayanan serta memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting karena masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia terutama di wilayah perdesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Berdasarkan pengalaman yang terjadi menunjukkan bahwa selama ini pola pemberdayaan masyarakat di Indonesia belum dijalankan secara optimal. Masih tingginya angka kemiskinan di desa menjadi bukti adanya kesenjangan sosial dan kurangnya intervensi pemerintah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia selalu terkait dengan upaya mengatasi kemiskinan. Pada prinsipnya kemiskinan

bukan sekadar fenomena, akan tetapi lebih merupakan proses yang tereduksi akibat kerentanan yang melanda banyak faktor.

Berdasarkan buku “Pengembangan Desa” yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional terutama untuk mengurangi masalah pokok yang dihadapi yakni kemiskinan serta tingginya angka ketimpangan antar daerah terutama wilayah desa dengan perkotaan. Terkait dengan masalah kemiskinan, berdasarkan data dari BPS jumlah penduduk miskin tahun 2012 yang tinggal di wilayah perkotaan berjumlah sekitar 8.60 % sedangkan penduduk miskin yang berada di desa jumlahnya lebih besar yakni 14.70 %.

Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yakni dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar kepada desa. Pembangunan desa mempunyai peranan penting dan strategis karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat yang bermukim di desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Berkaitan dengan pembangunan masyarakat desa, pemerintahan desa

berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban yang harus dilaksanakan demi terciptanya pembangunan masyarakat desa yang lebih baik. Berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) yang telah diundangkan tanggal 15 Januari 2014 dan dinyatakan berlaku pada hari yang sama.

Salah satu program yang menjadi perhatian adalah Program Dana Desa. Undang-Undang Tentang Desa menegaskan bahwa desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Desa membawa optimisme bagi desa, karena selama ini desa relatif terpinggirkan dan belum menjadi fokus utama pembangunan. Kehadiran Program Dana Desa memberi dampak atau konsekuensi besar terhadap penyelenggara pemerintahan desa tak terkecuali di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten.

Sejak memperoleh Anggaran Dana Desa terutama selama tiga tahun terakhir, Desa Tambong Wetan mengalami peningkatan dalam segi pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Hal yang mendasar misalnya pembangunan akses jalan terutama bagi para petani menuju ke sawah, pembangunan talud dan saluran irigasi serta pemberian bantuan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat lainnya.

Hal ini terbukti, ketika penulis mengikuti acara Musyawarah Rencana Pembangunan Desa pada bulan Maret lalu, dimana partisipasi masyarakat baik para tokoh, Ketua RT dan RW, Karang Taruna, dan berbagai lapisan masyarakat lain sangat antusias dan berperan aktif dalam memberikan saran dan masukan yang positif bagi pembangunan desa ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang telah berjalan dengan adanya program Dana Desa di desa Tambong Wetan seperti perbaikan jalan desa atau kampung, perbaikan saluran irigasi, pembuatan embung, pembangunan gedung PAUD, pembangunan Poliklinik Desa, sementara program non fisik yang telah berjalan yakni berupa kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai bentuk misalnya pelatihan keterampilan

berwirausaha, pembinaan karang taruna, kegiatan PKK dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Implementasi Program Dana Desa Melalui Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah).

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Dana Desa**

Menurut Drivjer dan Sajise (dalam Sutrisno,2005:18) terdapat lima macam konsep dalam mengembangkan konsep pemberdayaan yaitu;

- a. Pendekatan dari bawah (*bottom up approach*), pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Partisipasi (*participation*); dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
- c. Konsep keberlanjutan; merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program

pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

d. Keterpaduan; yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

e. Keuntungan sosial dan ekonomi; merupakan bagian dari program pengelolaan.

Menurut Sulistyani,AT. (2004) tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan.

Berbagai kajian dan teori dari para ahli tersebut menegaskan bahwa hakikat tujuan pemberdayaan ialah membentuk kekuatan individu dan masyarakat menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian masyarakat bisa membuka akses yang seluas-luasnya agar tidak terjadi monopoli dan dominasi kekuasaan. Sehingga, kelompok masyarakat terutama masyarakat desa mampu memanfaatkan potensi maupun sumber daya yang dimiliki untuk

mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian.

## **2. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Dana Desa**

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk dari pemberdayaan masyarakat. Masyarakat secara aktif terlibat dalam proses yang berorientasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan (Raharjo Adisasmita,2006:35).Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat sebagai upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat secara efektif dan efisien, seperti;

- (a). aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi);
- (b). dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring, dan pengawasan);
- (c). dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas, dan efisiensi).

Efektifitas diartikan sebagai rasio antara realisasi dengan target yang direncanakan, efisiensi dimaksudkan jika dapat dilakukan penghematan atau penekanan pemborosan, dengan demikian biaya produksi per unit dapat ditekan ke bawah. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diupayakan menjadi lebih terarah sesuai dengan

penyusunan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program secara efektif dan efisien.

Demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula. Partisipasi pada dasarnya mencakup dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Partisipasi secara internal berarti adanya rasa memiliki pada komunitas (*sense of belonging to the lives people*). Hal ini menyebabkan komunitas terfragmentasi dalam *labelling an identity* (pelabelan pada identitas mereka) sementara partisipasi dalam arti eksternal terkait dengan bagaimana individu melibatkan diri dengan komunitas luar, dari pemikiran tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan manifestasi tanggung jawab sosial dari individu terhadap komunitasnya sendiri maupun dengan komunitas luar (seperti: hubungan dengan pemerintah ataupun dengan komunitas masyarakat lainnya).

### **3. Model Implementasi Kebijakan Dalam Program Dana Desa**

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak faktor atau variabel dalam model implementasi

kebijakan dan masing-masing variabel dalam model implementasi kebijakan tersebut saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Di dalam model implementasi kebijakan menurut Subarsono,AG (2010) terdapat model kebijakan yang saling mempengaruhi proses implementasi tersebut sehingga membentuk teori-teori implementasi kebijakan.

A. Model Van Meter dan Van Horn yang lazim disebut juga dengan model proses implementasi kebijakan terdapat enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja, yaitu:

#### **1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan Kebijakan**

Ukuran atau standar dasar dan tujuan/sasaran kebijakan juga harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila ukuran atau standar dasar dan tujuan/sasaran kebijakan kabur, maka akan menjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi (Subarsono, 2010:99).

#### **2. Sumber-Sumber Kebijakan**

Dalam Subarsono (2010:100) menyebutkan sumber-sumber kebijakan bisa juga mencakup segala keperluan dalam implementasi kebijakan baik sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia, misalnya: berbagai kasus program pemerintah, seperti JPS

(Jaring Pengaman Sosial) untuk kelompok miskin di pedesaan kurang berhasil karena keterbatasan kualitas aparat pelaksana.

### 3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn, prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan yang dinyatakan, ketepatan, dan konsistensi dalam mengomunikasi ukuran dan tujuan tersebut. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain bagi keberhasilan suatu program (Subarsono,2010:100).

### 4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Budi Winarno (2007:163) menyebutkan bahwa Van Meter dan Van Horn menyatakan struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan.

### 5. Kondisi-Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dan sejauh mana kelompok

kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, ditambah lagi karakteristik para partisipan dan sifat opini publik yang ada di lingkungan dan elite politik mendukung kebijakan (Subarsono, 2010:101).

### 6. Disposisi Implementor

Disposisi Implementor ini mencakup 3 hal penting, yakni: respons implementor terhadap kebijakan yang akan mempengaruhi kemauan untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor yaitu presensi nilai yang dimiliki oleh implementor (Subarsono,2010:101).

### B. Model George C. Edward

Menurut Edwards dalam Winarno (2007:174) studi implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Untuk mengetahui pengkajian tersebut, Edwards membuat empat variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu faktor-faktor variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber-sumber atau sumber daya, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku (disposisi), dan struktur birokrasi.

Empat faktor atau variabel tersebut berpengaruh terhadap implementasi

kebijakan bekerja secara stimulan, dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Winarno,2007:17). Komunikasi merupakan keberhasilan kebijakan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan sehingga mengurangi distorsi implementasi.

Apabila tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Karena resistensi tersebut menjadi aktor buruk bagi implementasi kebijakan dengan kata lain implementasi kebijakan akan menemui kegagalan bilamana tidak ada respon dari kelompok sasaran karena tidak mengetahui jelas mengenai kebijakan tersebut dari implementor (Subarsono,2010:90).

Sumber-sumber/sumber daya juga faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berupa sumber daya manusia dan sumber daya non manusia (Subarsono,2010:90).

Disposisi atau tingkah laku merupakan sesuatu yang berhubungan dengan sumber daya manusia atau implementor, disini disebutkan disposisi adalah karakter yang

dimiliki implementor, seperti: komitmen, kejujuran, sifat demokrasi, teamwork (kerjasama tim), dan lain sebagainya. Disposisi yang baik sangat diperlukan oleh implementor karena dia akan menjalankan kebijakan dengan baik pula. Bila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi tidak akan berjalan efektif (Subarsono,2010:93).

#### **4. PERUBAHAN SOSIAL**

Perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap,dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan 1962 dalam Soerjono Soekanto, 2007:263). Perubahan sosial adalah perubahan fungsi kebudayaan dan perilaku manusia dari keadaan tertentu ke keadaan yang lain.

Setiap masyarakat dalam hidupnya pasti mengalami proses menuju ke perubahan. Perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan lain sebagainya.

William F.Ogburn, mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi

unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial (William F.Ogburn, 1964 dalam Soerjono Soekanto,2007:262). Salah satu hal yang terkait dengan perubahan juga dikemukakan oleh Talcott Parsons melalui teori fungsionalnya, dimana menurut pandangannya perubahan sosial yang dimaksudkan yaitu untuk lebih memahami proses perubahan itu sendiri. Parsons mendasarkan pandangannya pada konsep stabilitas atau equilibrium yang dianggap ciri utama suatu sistem.

Suatu struktur sosial, hubungan terpola merupakan bagian dari unsur normatif. Unsur-unsur tersebut berasal dari berbagai pandangan kesatuan yang tercermin dalam tingkah laku masyarakat yang dianggap benar atau sebaliknya. Pola-pola hubungan yang terjadi dalam suatu sistem sosial selain bersifat normatif, pola hubungan sistem sosial ini juga melembaga dikalangan masyarakat.

Dari gambaran umum para tokoh sosiologi mengenai teori perubahan sosial dapat disimpulkan bahwa teori perubahan sosial terletak pada perubahan unsur-unsur yang mempertahankan keseimbangan masyarakat atau stabilitas masyarakat. Objek atau ruang lingkup dari perubahan sosial tersebut meliputi unsur-unsur geografis, ekonomi, maupun kebudayaan,

dan sifat dari perubahan sosial tersebut yaitu bersifat periodik dan non periodik.

## **5. Tinjauan tentang Program Dana Desa**

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa, membangun paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-Undang ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, akan tetapi sebagai halaman depan Indonesia. Undang-Undang ini juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas dalam pengaturan desa. Undang-Undang Desa telah mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini dianggap terpinggirkan.

Secara umum, Undang-Undang Desa meletakkan desa dalam posisi selayaknya, yakni sebagai kesatuan masyarakat hukum khas Indonesia yang keberadaannya mendahului negara modern Indonesia. Selain itu, juga pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memberikan keleluasaan bagi desa untuk menyelenggarakan pembangunan secara mandiri (Yustika, 2014:2). Visi Tri Sakti Presiden periode tahun 2014-2019 meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya.

Untuk merealisasikan visi tersebut pemerintah bertekad (dalam Nawa Cita) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu wujud Evaluasi Dana Desa, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) setiap tahun anggaran.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga tahap yaitu: tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40% dan tahap ketiga pada bulan Oktober sebesar 20%. Pencairan Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Penyampaian Anggaran Pendapatan Belanja Desa kepada Bupati/Walikota dilaksanakan pada bulan Maret (Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015). Untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, maka Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengamanatkan bahwa menteri yang menangani desa

rekognisi negara kepada desa, adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 . menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa yang disetujui.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten. Lokasi ini dipilih karena Desa Tambong Wetan merupakan salah satu desa yang mendapatkan dana atau anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Program Dana Desa dan telah mengimplementasikannya dengan kegiatan langsung yang berbasis pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari segi sosial maupun ekonomi.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan antara bulan Maret hingga April tahun 2018. Proses penelitian diawali dengan observasi yang dimulai sejak bulan Desember tahun 2017 lalu dengan melihat berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan program Dana Desa beserta seluruh kegiatan pasca program hingga bulan Januari 2018. Sementara pengambilan data dimulai pada

bulan Maret dan berakhir hingga bulan April 2018.

### **3. Bentuk dan jenis penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, Lexy 2007:4) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Moleong, Lexy (2007) penelitian kualitatif memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau kelompok tertentu. Pemilihan metode kualitatif karena unit analisisnya bukan berupa angka akan tetapi mendeskripsikan suatu kelompok tertentu dalam masyarakat

### **4. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ialah sumber informasi dan data serta masukan-masukan dalam menjawab masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informannya yaitu; Kepala Desa Tambong Wetan, Perangkat Desa Tambong Wetan, Ketua Tim Pelaksana Program, serta masyarakat yang berpartisipasi langsung dengan kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di desa Tambong Wetan. Sedangkan Objek penelitiannya meliputi; pelaksanaan atau implementasi program Dana Desa di desa Tambong Wetan dan dampak dari adanya

program tersebut bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.

### **5. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang peneliti gunakan untuk memperoleh informasi valid dan relevan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### **a. Sumber data primer**

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel penelitian. Data dapat direkam dan dicatat oleh peneliti Sarwono, (2006:210). Namun selain wawancara peneliti juga menggunakan observasi sebagai sumber data primer. Karena observasi sangat penting terutama dalam rangka mengkomunikasikan ulang hasil wawancara kepada kejadian lapangan.

#### **b. Sumber data sekunder**

Peneliti menggunakan data yang sudah tersedia, biasanya hasil kajian penelitian sebelumnya yang membahas tema yang sama. Peneliti mencari data sekunder dengan cara membaca, melihat mendengar karena Sarwono, (2006:210) menjelaskan data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara melihat membaca dan mendengar.

### **6. Teknik Pengumpulan Data**

#### **A. Metode Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau

keterangan dari pihak yang diwawancarai. Dalam konteks penelitian, bentuk wawancara yang dilakukan dengan wawancara secara perorangan maupun kelompok.

#### **B. Metode Observasi**

Metode Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan mencatat segala sesuatu yang bisa dijadikan data atau bahan untuk dianalisis. Metode yang digunakan peneliti adalah non partisipan observer, artinya peneliti tidak ikut serta secara langsung dalam kegiatan yang sudah dilaksanakan.

#### **7. Validitas Data**

### **D. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **1. Program Dana Desa**

Masyarakat desa Tambong Wetan telah mengetahui adanya program Dana Desa sejak tahun 2015. Hal ini dikarenakan pemerintah desa telah melaksanakan sosialisasi dan musyawarah rencana pembangunan desa, seperti yang disampaikan oleh informan bapak RJ sebagai kepala desa Tambong Wetan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Dana Desa pembangunan desa, seperti yang disampaikan oleh informan bapak RJ sebagai kepala desa Tambong Wetan.

#### **2. Implementasi Program Dana Desa**

##### **a. Bidang Ekonomi**

Yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau pembandingan terhadap data tersebut. Hal ini akan dicapai dengan membandingkan data hasil wawancara di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi dan dokumen yang berkaitan.

#### **8. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data seperti yang dikemukakan Miles dan Huberman (Idrus,2009:148) adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Dana Desa pembangunan desa, seperti yang disampaikan oleh informan bapak RJ sebagai kepala desa Tambong Wetan. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Program Dana Desa telah berjalan dan disosialisasikan di desa Tambong Wetan, dalam program ini juga dilibatkan berbagai macam sektor aparatur desa dan masyarakat seperti Tim Pelaksana Kegiatan, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, lembaga desa, serta tim pendamping.

Sebagaimana dijelaskan oleh Sulistyani, A.T (2004), tujuan dari

pemberdayaan adalah membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian yang dimaksud meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Sejalan dengan dengan perencanaan dalam musyawarah desa bahwasanya pemerintah desa Tambong Wetan pada tahun awal dimulainya program ini memfokuskan pada pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan desa seperti perbaikan jalan, pembangunan fasilitas PAUD, pembangunan poliklinik desa.

Selain itu program ekonomi lainnya yakni fasilitasi bagi usaha mikro kecil menengah, pelatihan kewirausahaan, permodalan bagi pengusaha kecil. Adanya pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi bertujuan agar masyarakat memiliki kemampuan dan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjangkau sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatan dan taraf ekonomi, seperti pendapat dari Edi Suharto, 2010 dalam bukunya "Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat" bahwa pemberdayaan adalah proses untuk menjadikan masyarakat kelas bawah atau kelompok lemah dapat lebih berdaya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri.

#### **b. Bidang Sosial Budaya**

Sejalan dengan Anggaran Dana Desa yang sudah berjalan di desa Tambong Wetan, seperti disampaikan oleh informan bapak AW, pemerintah desa Tambong Wetan juga mengimplementasikan program di bidang sosial-budaya yang didalamnya termasuk terdapat unsur pendidikan, kesehatan, pelayanan masyarakat seperti ; pembekalan atau bimbingan teknis bagi aparatur desa, pembinaan posyandu, pembinaan bagi anggota PKK dan karang taruna, fasilitasi pelaksanaan hari besar nasional dan keagamaan.

Di bidang ini juga diselenggarakan acara kirab budaya desa untuk melestarikan tradisi dan adat budaya nusantara. Budaya gotong royong khas masyarakat desa juga tercermin dalam kegiatan bersih desa sebelum digelarnya kirab budaya. Aparatur desa seperti linmas dan babinsa maupun babinkamtibmas juga memberikan pendampingan bagi setiap warga untuk turut serta dalam berbagai kegiatan sosial-budaya dan berperan menjaga lingkungan, keamanan, dan ketertiban.

### **3. Partisipasi Masyarakat Melalui Program Dana Desa**

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela masyarakat desa dalam perubahan yang ditentukannya sendiri. Keterlibatan sukarela itu dapat berupa proses penentuan arah kebijakan dalam menentukan hasil dan manfaat pembangunan di desa secara

berkeadilan (Azis Muslim, 2009:48). Berdasarkan pernyataan dari informan bapak K selaku ketua tim pelaksana kegiatan program Dana Desa, bahwa masyarakat desa Tambong Wetan selalu dilibatkan mulai dari penyampaian gagasan, musyawarah desa, dan pada saat pelaksanaan kegiatan. Program Dana Desa juga berperan menjadikan masyarakat desa Tambong Wetan lebih aktif dan peduli tentang kemajuan dan pembangunan di wilayahnya.

#### **4. Dampak Program Dana Desa**

Desa Tambong Wetan sebagai desa yang menerima anggaran Program Dana Desa dari Pemerintah Pusat mengimplementasikan program melalui dua hal yakni pembangunan fisik dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian pemerintah desa Tambong Wetan telah menjalankan berbagai kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan warga desa. Dampak adanya berbagai program dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh warga, sisi positif program ini terutama bagi peningkatan ekonomi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Pada tingkat perekonomian, masyarakat desa yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan pedagang merasakan manfaat dari adanya perbaikan jalan desa, perbaikan saluran irigasi pertanian, dan pemberian

bantuan pupuk dan subsidi bagi petani. Selain itu, berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian bantuan modal bagi usaha kecil, pelatihan keterampilan menjadikan masyarakat desa lebih mandiri, pendapatan harian mengalami peningkatan, dan mengurangi angka pengangguran di desa.

Selain itu peningkatan pembangunan infrastruktur dasar seperti pembangunan gedung bagi pendidikan anak usia dini, pembangunan fasilitas poliklinik desa, pembangunan gedung pertemuan desa, dan pemberian beasiswa bagi anak sekolah berprestasi berkontribusi bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa TambongWetan. Pemberdayaan masyarakat selain berpengaruh pada bidang ekonomi, juga berdampak bagi kehidupan sosial budaya warga desa itu sendiri. Masyarakat mulai tertarik untuk berpartisipasi langsung dalam proses pembangunan dan pemberdayaan, peningkatan solidaritas dan kepedulian warga terhadap kemajuan suatu desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Agus Salim yakni perubahan sosial adalah suatu bentuk peradaban umat manusia akibat adanya seleksi alam, biologis, fisik yang terjadi sepanjang kehidupan manusia.

Setiap manusia pasti mengalami perubahan, baik berupa perubahan positif maupun negatif dan perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap pribadi manusia

itu sendiri (2002:1). Program Dana Desa di wilayah Tambong Wetan mewujudkan perubahan yang direncanakan untuk membangun desa dan masyarakatnya ke arah yang lebih baik.

Hasil penelitian mengenai program Dana Desa ini berdasarkan konsep perubahan sosial, dapat diartikan bahwa pembangunan merupakan suatu usaha sadar dan direncanakan untuk mencapai tujuan berdasarkan norma-norma tertentu, menggunakan potensi berupa alam, manusia, serta sosial-budaya. Proses pembangunan desa menjadi bagian dari mekanisme keinginan pemerintah yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat untuk menentukan keberhasilan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Dana Desa Melalui Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tambong Wetan, Kalikotes, Klaten, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa program Dana Desa yang bergulir sejak awal kemunculannya tahun 2015 hingga saat ini berdampak positif dan dirasakan manfaatnya oleh warga desa. Terkelolanya potensi sumber daya lokal desa secara optimal, terjangkau aksesibilitas masyarakat desa

terhadap pelayanan dasar dan kegiatan sosial ekonomi.

Tumbuhnya solidaritas sosial dan kegotong-royongan warga desa Tambong Wetan juga menunjukkan peran aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan yang didanai dengan program Dana Desa ini. Sesuai dengan teori perubahan sosial menurut Soerjono Soekanto bahwa perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat termasuk perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Program Dana Desa ini dibuat oleh pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih bagi desa sebagai tingkatan pemerintah paling bawah agar menjadi desa mandiri serta lepas dari ketertinggalan dan kesenjangan.

### **2. SARAN**

#### **a. Bagi Pembaca**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, sehingga penelitian mengenai pemberdayaan dan program dana desa menjadi lebih lengkap kedepannya.
2. Pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program dana desa juga dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut agar program ini berjalan secara optimal.

#### **b. Bagi Masyarakat Desa Tambong Wetan**

1. Masyarakat desa Tambong Wetan secara keseluruhan harus mendukung dan berpartisipasi langsung dalam setiap program yang dijalankan pemerintah desa Tambong Wetan.
  2. Berbagai macam sarana dan fasilitas yang telah dibangun di desa Tambong Wetan harus dijaga dan dirawat dengan baik agar program pembangunan yang ada dapat bermanfaat bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.
  3. Pelatihan dan pemberdayaan yang berjalan diharapkan ditindaklanjuti oleh masyarakat desa untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang lebih optimal.
1. Program Dana Desa harus tetap dijalankan dan ditingkatkan anggarannya, disertai evaluasi perbaikan agar pembangunan desa berjalan optimal
  2. Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait harus melakukan penyederhanaan regulasi dan peraturan perundangan agar program Dana Desa dapat diimplementasikan oleh aparatur desa dan diterima secara baik oleh masyarakat desa secara keseluruhan.
  3. Pemerintah Pusat, Daerah, dan seluruh aparatur pemerintah desa harus meningkatkan kepedulian terhadap kemajuan dan pembangunan desa serta meningkatkan pelayanan bagi seluruh masyarakat desa.

**c. Bagi Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pemerintah Desa Tambong Wetan**

**F. DAFTAR PUSTAKA**

- AG Subarsono.(2010). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azis. Muslim.(2009). *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Badan Pusat Statistik.(2013). *Jumlah Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin dIndonesia*. Tersedia di <http://www.bps.go.id/> tab diakses pada 1 Juni 2018. Pukul 11.15
- Idrus.Muhammad.(2009).*Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.(2014). *Pengembangan Desa*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat & Pemberdayaan Desa.

Moleong, Lexy. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Soerjono Soekanto. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT. Rafika Aditama.

Sulistiyani, AT. (2004). *Kemitraan & Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gala Media.

Raharjo, Adismita. (2013). *Pembangunan Perdesaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salim, Agus. (2002). *Perubahan Sosial Sketsa dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

